

SKRIPSI

**PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT
UMUM**



Disusun Oleh:

NIKITA LYDIA NOVIANI SUMITO

NIM : 02114062

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

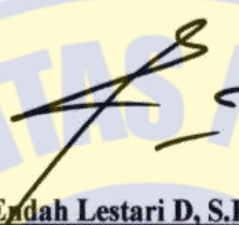
2018

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah Direvisi

Pada tanggal 16 Agustus 2018

Oleh Dosen Pembimbing :



Endah Lestari D, S.H, M.H
NIDN:0713056101



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama




Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.
NIDN: 0711058902

HALAMAN PERSETUJUAN

SURABAYA, 31 JULI 2018

DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH


Dosen Pembimbing :



Endah Lestari D, S.H., M.H.
NIDN:0713056101

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama
PRO PATRIA



Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.
NIDN: 0711058902

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nikita Lydia Noviani Sumito

Nim : 02114062

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA
PENUNTUT UMUM

Menyatakan dengan sebenarnya penulisan saya tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam penulisan ini kecuali sebagai acuan dan kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan Skripsi yang lazim digunakan.

Surabaya, 31 JULI 2018

Penulis

Nikita Lydia Noviani Sumito
02114062



ABSTRAK

Nikita Lydia Noviani Sumito, NIM : 02114062 Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan Peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun Mahkamah Agung melalui putusan No 55PK/Pid/1996 mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Di dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung diperbolehkan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Kemudian pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 33/PUU-XIV/2016 menafsirkan bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP hanya terpidana dan ahli warisnya yang boleh melakukan peninjauan kembali, Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang melakukan Peninjauan Kembali. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: putusan Mahkamah Agung Nomor: 55PK/Pid/1996 yang mengabulkan peninjauan kembali dari jaksa penuntut umum merupakan pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Penafsiran yang dilakukan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 55PK/Pid/1996 telah menjadikan putusan ini sebagai Yurisprudensi untuk menerima peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berhak melakukan peninjauan kembali adalah terpidana dan ahli warisnya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini maka logika hukumnya adalah permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak pernah ada karena inkonstitusional.

Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Jaksa Penuntut Umum

ABSTRACT

Nikita Lydia Noviani Sumito, NIM : 02114062 *Submission of Judicial Review by the Public Prosecutor. Article 263 paragraph (1) of KUHAP stating the Review is the last legal effort filed by the convicted person or his heir. However, the Supreme Court through Decision No. 55PK / Pid / 1996 granted the review submitted by the Public Prosecutor. In some Supreme Court rulings it is permissible for the Public Prosecutor to file a review. Then in 2016 the verdict Indonesian Constitutional Court Number No. 33 / PUU-XIV / 2016 interpret the meaning contained in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code only the convicted person and his / her heirs may conduct the review, the Public Prosecutor is not authorized to conduct the Review. This paper is based on normative research with the Legislative Approach and conceptual approach. The results of this study indicate that: Supreme Court decision Number: 55PK / Pid / 1996 which grant the review of the public prosecutor is a legal reform conducted by the Supreme Court. The interpretation of the Supreme Court in Decision Number 55 / K / Pid / 1996 has made this decision as Jurisprudence to receive a review conducted by the public prosecutor. Decision of the Constitutional Court No. 33 / PUU-XIV / 2016 affirms that Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which is entitled to review is the convicted person and his heir. Based on the decision of this Constitutional Court, the legal logic is that the request of Judicial Review by the Public Prosecutor is considered never existed because it is unconstitutional.*

Keywords: Judicial Review, Public Prosecutor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Permasalahan	1
1.2 Penjelasan Judul	6
1.3 Alasan Pemilihan Judul	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	8
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	10
BAB II PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM	
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Agung	12
2.1.1 Pengertian Mahkamah Agung	12
2.1.2 Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Agung	14
2.1.3 Sifat Putusan Mahkamah Agung	15
2.2 Pengertian, Tugas, dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum	16

2.2.1 Pengertian Jaksa Penuntut Umum	16
2.2.2 Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum	17
2.3 Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali	19
2.4 Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum	22
BAB III KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAPT YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG	
3.1 Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Konstitusi	33
3.1.1 Pengertian Mahkamah Konstitusi	33
3.1.2 Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi ..	35
3.1.3 Sifat dan Daya Ikat Mahkamah Konstitusi	38
3.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/Puu-Xiv/2016 Tentang Uji Materi Pasal 263 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	39
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan yang berisi uraian dan pembahasan diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 55PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996 yang mengabulkan peninjauan kembali dari jaksa penuntut umum pada kasus Muchtar Pakpahan merupakan pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Penafsiran yang dilakukan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 55PK/Pid/1996 telah menjadikan putusan ini sebagai Yurisprudensi untuk menerima peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum seperti dalam putusan perkara : RAM Gulumal (No.03PK/Pid/2001), Polycarpus (No.109PK/Pid/2007), Joko S Tjandra (No.12PK/Pid/2009). Dalam hal ini Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berdasarkan dari putusan Mahkamah Agung No. 55 K/Pid/1996 tanggal 25 Oktober atas Peninjauan Kembali pada kasus Muchtar Pakpahan.
2. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, Mahkamah Konstitusi tidak membuat norma baru hanya menegaskan kembali makna substansi Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ada empat landasan pokok

yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 KUHAP, yaitu: Pertama, Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*). Kedua, Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Ketiga, Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Keempat, Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pidana. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUU-XIV/2016 maka logika hukumnya adalah permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan permohonan tersebut dianggap tidak pernah ada karena inkonstitusional. Dengan demikian putusan Peninjauan Kembali atas nama Muchtar Pakpahan (No. 55PK/Pid/1996), RAM Gulumal (No. 03PK/Pid/2001), Polycarpus (No. 109PK/Pid/2007) dan Joko S Tjandra (No. 12PK/Pidsus/2009) adalah putusan yang tidak pernah ada dan inkonstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andy Hamza dan Irdan Dahlan, 1987, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Barda nawaei Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, UNDIP, Semarang, 2011

Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Ed. 1, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan, Bagian Pertama)*, Ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007

Marwan Effendy, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Gaung Persada, Jakarta, 2012.

Machfud Aziz, 2010, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Maruar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2007

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2012

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1970

Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta

Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: Wacana Intelektual, 2007

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung, 1999

Jurnal Hukum:

Mudzakkir, "Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2011

Fadel, 2012, *Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia*, Makassar, Universitas Hassanuddin

Peraturan Perundang-Undangan :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/Pid/2007
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016

Website :

<https://www.kamusbesar.com/pengajuan> , diakses pada tanggal 6 Mei 2018 pukul 16.27

<https://www.kompasiana.com/surahman/peran-penting-jaksa-penuntut-umum-dalam-menegakan-keadilan5501016fa33311ef6f512c99> diakses pada tanggal 1 april 2018 pukul 11.47

https://www.researchgate.net/publication/306048477_PENINJAUAN_KEMBALI_OLEH_JAKSA_PENUNTUT_UMUM_ANTARA_KEPASTIAN_DAN_KEADILAN, diakses pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 16.27

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5734711a1fc21/akhirnya-mk-larang-jaksa-ajukan-pk> , diakses pada tanggal 14 Juni 2018 pukul 15.30.

